

BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN NIKAH KARENA SAKIT JIWA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN ATURAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN NIKAH.

A. Analisis Pembatalan Nikah Menurut Imam Syafii

Hal yang dapat membatalkan nikah menurut imam syafii yaitu Dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu:

- 1) Fasakh Karena Syarat-Syarat yang Tidak Terpenuhi Ketika Akad Perkawinan.
Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut.Terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.¹ Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi.Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (mawani') nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya mawani' tersebut dinyatakan batal.²
- 2) Fasakh Karena Hal-Hal Mendatang Setelah Akad

¹Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Indonesia*(Jakarta,Prenda Media) 243.

²Ibid., 244.

Contoh lain ialah pembatalan pernikahan karena cacat, yang dimaksud dengan cacat ini ialah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat akhlak. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertipu. Dikalangan 4 madzab-mazhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan, diantaranya:

- Impotensi
- Al-Khansha* (memotong/meremukkan).⁵
- Gila
- Sopak dan Kusta
- Rataq* (tersumbat), *AlQarn*(sesuatu yang menonjol), *Afal* (membusa),*Ifdha*(*tercampur*)

⁴Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2, terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 534.

68

Imam Syafii menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh berbicara halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (min jihah al-,ilm) yaitu berupa kabar dari Kitab, Sunah, Ijma, atau kiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sebagai landasan hukum.⁸

B. Analisis Pembatalan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 71 sudah diatur mengenai perkara apa saja yang dapat membatalkan perkawinan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
- Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sebagaimana juga dijelaskan dalam KHI bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, yang mana jika melaksanakannya merupakan ibadah karena merupakan perintah Allah, namun pernikahan juga dapat dibatalkan, berikut macam-macam pernikahan/perkawinan yang dapat dibatalkan dalam KHI pasal 70 :

⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii* (Bandung ,Remaja Rosdakarya 2001).63.

sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakann haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kesimpulan dari pasal 72 KHI di atas adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sama halnya dengan orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu tindakan hukum maka tidak berakibat hukum, kecuali bila ada indikasi lain seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 72 di atas.

Dalam KHI juga diatur mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal 73:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selanjutnya Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan, (KHI pasal 74 ayat 1) berbeda dengan permohonan talak yang mana pengajuannya dilakukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri .

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski terkadang membawa kepahitan dari pendapat di atas sudah sangat jelas bahwasanya Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung tentang penyakit yang mengganggu kejiwaan (gila).

Sedangkan persamaan pendapat Imam Syafii dengan Kompilasi Hukum Islam dari Umar r.a bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentnag laki-laki yang telah jauh dari istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya, apabila mereka telah menceraikan istrinya, hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan. Menurut pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik terhadap harta bersama bila perkawinan didasarkan atas perkawinan lain.

Karena pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak ba'in ialah mengakhiri seketika juga dan talak raj'i ialah tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, kalau memang mau memfasakh kan cukup

